

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Fundamental Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arfa'i. dan Ayu Desiana. 2007. Analisis Yuridis Tentang Susunan dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Pemerintahan Desa Menurut Peraturan V Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. *Jurnal Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi*
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik (Filsafat - Paradigma - Teori - Tujuan - Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asni, Fauzi; Maryunani, Sasongko, Dwi Budi. 2013. The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 10, Issue 4 (May. - Jun. 2013), PP 01-09*
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia pustaka Utama
- Fitra, Melisa. 2009. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. *Jurnal Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar*
- Hamidi, Jazim. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMMP Press.
- Juliantara, Dadang. 2010. *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Yogyakarta: Laper Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Momongan, Liandy. 2014. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar*.

- Pakdeewut. 2012. *The Development of Village Fund into an Integrated Community Financial Institution*. Thailand
- Phinanditia. 2010. Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*
- Pranada. 2010. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan APBDes Tahun 2009-2010 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2006 (Studi di Desa Candisari Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo). *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Surakhmad, Winarno. 2000. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Tarsito
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang *Desa*
- Widjaya, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Whinney, Christine and Joe Madiath. 2013. Enabling The Poorest To Benefit From Decentralisation: Gram Vikas' Model. *Discussion Paper – Series , United Nations Development Programme, New Delhi. April 2013*